

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era kemajuan teknologi saat ini, media massa telah mengalami percepatan yang signifikan, jauh lebih cepat dibandingkan beberapa dekade lalu. Oleh karena itu, setiap informasi di media massa harus mencakup unsur-unsur yang sesuai dengan fungsi lembaga penyiaran, yang menjamin publik memperoleh informasi yang akurat dan sesuai dengan hak asasi manusia, serta disusun secara sistematis. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, media massa berkontribusi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, serta sebagai sarana kontrol untuk menanggapi berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi. (Suparno, Muktiyo, dan Susilastuti 2016 : 62)

Peran penting media dalam kehidupan masyarakat meliputi berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, ideologi, dan sosial budaya. Contohnya, hubungan antara media dan politik terlihat dalam proses-proses politik yang menghubungkan konstituen dengan elit, seperti kampanye, pendidikan politik, dan pembentukan budaya politik. Media sering dianggap sebagai elemen krusial dalam proses politik yang demokratis, menyediakan ruang dan saluran yang luas untuk debat politik. Selain itu,

media juga menjadi sarana bagi politisi dan aktor politik untuk memperkenalkan diri, menyebarluaskan kebijakan, kepentingan, visi, dan pandangan politik mereka, serta mendistribusikan informasi dan opini. (Suparno dkk, 2016 : 31)

Kebutuhan masyarakat akan informasi saat ini mendorong mereka untuk memilih media online sebagai sumber informasi. Media online dianggap lebih mudah dan cepat diakses untuk mendapatkan berita. Di era digital ini, penggunaan smartphone memungkinkan akses informasi yang diinginkan dengan mudah. Salah satu bentuk media online yang populer adalah situs berita. Situs berita atau portal berita menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengunjung mengakses informasi secara interaktif. Kontennya mencakup layanan yang berkaitan dengan berita, seperti tanggapan langsung, pencarian artikel, dan forum diskusi (Darminto, 2017:22). (Anggraeni, Wuryanta, 2020 : 67).

<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communications>

Pemberitaan politik memiliki pembentukan opini publik. Pembentukan opini publik ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan politik pemerintah. media massa menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*), melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*), dan melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*) dalam menyusun kerangka pembentukan opini publik. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk membagikan

pemberitaan yang aktual. Dengan tingginya harapan masyarakat terhadap berita, khususnya dalam berita politik, diharapkan portal berita online dapat menyajikan informasi yang berkualitas tersebut. (Hamad 2004: 2)

Konsumsi media dan koneksi publik memiliki dimensi terkait berinteraksi dengan media di era sekarang. Dalam masyarakat modern saat ini, orang semakin memilih media sesuai keinginan mereka. Media tidak lagi menjadi cara utama untuk terhubung, audiens kini lebih terpecah berdasarkan minat pribadi, berkat pengaruh internet dan media digital. Ada perubahan dari media massa, terutama televisi, ke internet dan media mobile. (Couldry, Livingstone, dan Markham 2010 : 35). Di era modern ini, jemaah haji mendapatkan informasi tentang Dana Haji tidak hanya dari TV atau koran, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya.

Berita politik di media yang mengangkat seputar peristiwa yang sedang terjadi dapat memengaruhi cara publik bertindak, bersikap, dan membuat keputusan. Isu politik sering muncul ketika ada ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan tindakan para pemimpin politik. Namun, dalam menghadapi isu politik, seringkali orang terjebak dalam berita yang belum tentu akurat. Akibat dari kemajuan teknologi, sumber-sumber hoax yang tidak berisi kebenaran dapat menyesatkan arah masyarakat dalam memahami situasi dan kondisi politik yang sedang terjadi tersebut. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk bersikap selektif terhadap isu-isu politik yang muncul di media. (Allan 2010 : 162)

Salah satu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan yaitu isu dana haji 2025 yang berkaitan dengan kementerian agama. Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks politik dan kebijakan publik di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan haji telah menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan kepada jamaah. Media massa sebagai mediator informasi politik mampu mempengaruhi pembentukan struktur sosial maupun partisipasi masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Peranan ini menempatkan media massa sebagai saluran komunikasi politik (Wiendijarti, 2008: 34).

Kondisi yang sama pada 2 September 2024 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI. Rapat tersebut dipimpin oleh Nusron Wahid dan menghadirkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, sebagai saksi. Pansus ingin menggali informasi mengenai pembayaran pelaksanaan ibadah haji 2024 dan pengelolaan keuangan haji secara keseluruhan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah adanya dugaan ketidaksesuaian antara surat dari Kementerian Agama dan hasil kesepakatan rapat dengan DPR RI mengenai kuota haji. Pansus juga menyoroti dugaan korupsi terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus, berdasarkan informasi dari biro perjalanan haji.

<https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/gali-informasi-dari-bpkh-pansus->

[terima-informasi-dugaan-korupsi-pengalihan-kuota-haji/](#), (diakses pada 21 Februari 2025)

Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M. Kesepakatan ini dibahas dalam Rapat Kerja yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Komisi VIII DPR RI. Rapat tersebut berlangsung di Komplek Parlemen Senayan dan dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang. Selain Menteri Agama, hadir juga Wamenag Muhammad Syafii, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta beberapa pejabat Kemenag.

Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama sepakat membentuk Panja untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M. Mereka akan melibatkan Badan Penyelenggara Haji RI dan segera memulai pembahasan asumsi dasar serta komponen BPIH secara mendetail. Menag juga menegaskan komitmennya untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi di tanah suci maupun di Indonesia terkait penyelenggaraan haji. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap segala bentuk penyimpangan, baik di tanah suci maupun di tanah air.

<https://www.nu.or.id/nasional/pemerintah-dan-dpr-sepakat-bentuk-panitia-kerja-bpih-untuk-haji-2025-JrMoE>, (diakses pada 21 Februari 2025).

Gambar 1.1
Postingan @Kemenag tentang Dana Haji 2025



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DEfALk2JY8U/?igsh=MWlrODV3cThram44MQ==> , yang diakses 08 Juni 2025, 22.31 WIB

Pada gambar 1.1 mengenai pemberitaan tentang isu dana haji 2025 di media massa terkhusus pada akun instagram @Kemenag menjadi perhatian yang signifikan, terutama di Indonesia yang memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Setiap tahun, jutaan jemaah melaksanakan ibadah haji, dan berbagai faktor politik serta kebijakan pemerintah sering mempengaruhi keberangkatan mereka. Dalam hal ini, Kementerian Agama (Kemenag) memainkan peran kunci dalam pengelolaan dan pengaturan pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, kredibilitas Kemenag dalam menangani isu dana haji 2025 sangat mempengaruhi pandangan masyarakat. Kredibilitas ini dipertahankan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pertanggal 27 Januari penurunan biaya haji untuk tahun 2025, yang diumumkan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jemaah reguler ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79, turun sekitar Rp 4 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dicapai melalui efisiensi pengeluaran dan penghapusan pungutan yang membebani jemaah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Nasaruddin juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi berkontribusi dalam mengurangi jumlah pelaksana, sehingga biaya dapat ditekan lebih lanjut. <https://news.detik.com/berita/d-7752337/biaya-haji-2025-turun-menag-tak-ada-lagi-pungutan-bebani-jamaah>, (diakses pada 21 Februari 2025).

Teori yang digunakan berkaitan Teori media baru yang dikembangkan oleh Pierre Levy menjelaskan bagaimana kemajuan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial manusia. Levy memandang World Wide Web (WWW) sebagai ruang informasi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis, yang memungkinkan pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membentuk pengetahuan dan memperluas hubungan sosial. (Littlejohn & Foss, 2009 :414).

Dalam teori ini terdapat dua pendekatan, yakni interaksi sosial dan integrasi sosial. Pendekatan interaksi sosial menekankan kedekatan antara media dan audiens, di mana media digital memungkinkan terjadinya

komunikasi langsung, partisipatif, dan terbuka. Sementara itu, pendekatan integrasi sosial memandang media sebagai bagian dari kehidupan sosial yang membentuk kebiasaan baru dan mempererat keterikatan komunitas. Media baru juga dipahami sebagai bentuk konvergensi teknologi yang menggabungkan berbagai media tradisional ke dalam satu platform berbasis digital, yang memungkinkan akses cepat, mudah, dan global (McQuail, 2011).

Dalam konteks ini, akun Instagram @Kemenag menjadi representasi nyata dari praktik media baru, di mana publik dapat mengakses informasi secara instan, memberikan respons melalui komentar atau likes, serta membangun koneksi digital dengan pemerintah. Dengan demikian, media sosial seperti Instagram tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga ruang interaksi yang mencerminkan transformasi komunikasi publik di era digital.

James M. Kouzes, B. Z. (2011) dalam bukunya *credibility*. Kredibilitas yang berarti "bagaimana para pemimpin mendapatkan kepercayaan dan keyakinan." Pemimpin yang memiliki kredibilitas tinggi dapat menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan tegas, jelas, adil, jujur, terbuka, dan mematuhi hukum, mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut. Namun, banyak pemimpin yang kehilangan kredibilitasnya akibat tindakan mereka sendiri yang merusak reputasi tersebut. (Kouzes, Posner, 2011 : 35).

Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai konsumsi media berita isu dana haji 2024 terkait penyelewengan dana. dimana pada akhir 2024 kementrian agama (KEMENAG) bekerja sama dengan DPR RI membuat panitia kerja haji, panitia khusus haji, serta bekerja sama dengan KPK dan dana haji 2025 pemerintah berhasil menurunkan terkait dana haji 2025. Penurunan biaya ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji, menjaga kelangsungan keuangan haji, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana haji. Melihat pada urgensi permasalahan, dasar argumentasi, dan data yang dianalisis oleh peneliti, isu dana haji ini memang perlu ditelaah lebih lanjut lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berita mengenai isu dana haji 2025 saat ini menjadi perhatian utama masyarakat, terutama terkait dampaknya pada kebijakan dan keputusan Kementerian Agama. Tingginya minat masyarakat terhadap berita politik haji tidak hanya mencerminkan ketertarikan publik, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pandangan dan sikap mereka terhadap lembaga tersebut. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana konsumsi media dan koneksi publik dapat membentuk perspektif jemaah haji dan dampaknya terhadap kredibilitas Kementerian Agama.

Kredibilitas Kementerian Agama aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemberitaan yang intens dan sering kali kontroversial salah satunya terkait dana haji dapat berdampak besar pada citra lembaga ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menyelidiki hubungan antara konsumsi media dan koneksi publik akun Instagram @Kemenag isu dana haji 2025 pada postingan 06 Januari 2025 dengan kredibilitas Kementerian Agama. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana konsumsi media dan koneksi publik akun Instagram @Kemenag mengenai isu dana haji 2025 pada konten 06 Januari 2025?
2. Bagaimana kredibilitas Kementerian Agama dalam akun Instagram @Kemenag adanya isu dana haji 2025 menurut Jemaah haji 2025 KBIHU Al Muna Depok pada konten 06 Januari 2025?
3. Apakah terdapat hubungan antara konsumsi media dan koneksi publik @Kemenag dengan kredibilitas Kementerian Agama isu dana haji 2025 menurut Jemaah haji 2025 KBIHU Al Muna Depok pada konten 06 Januari 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam konteks meningkatnya perhatian publik terhadap isu politik haji, penting untuk memahami bagaimana pemberitaan media dapat memengaruhi persepsi jemaah dan kredibilitas lembaga pemerintah.

Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara konsumsi media dengan pandangan masyarakat khususnya jemaah haji 2025 KBIHU Al Muna Depok mengenai isu dana haji. Dengan demikian, kita dapat menggali lebih dalam mengenai dampak dari konsumsi media dan koneksi publik dana haji 2025 terhadap opini publik dan bagaimana hal ini berkontribusi pada persepsi tentang Kementerian Agama.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengukur kredibilitas Kementerian Agama dalam konteks pemberitaan politik haji. Kredibilitas lembaga ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana pemberitaan media berpengaruh terhadap kredibilitas Kementerian Agama sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsumsi media dan koneksi publik akun Instagram @Kemenag isu dana haji 2025 pada konten 06 Januari 2025.
2. Untuk mengetahui kredibilitas Kementerian Agama dalam akun Instagram @Kemenag adanya isu dana haji 2025 menurut Jemaah haji 2025 KBIHU Al Muna Depok pada konten 06 Januari 2025
3. Untuk mengetahui hubungan antara konsumsi media dan koneksi publik akun Instagram @Kemenag dengan Kredibilitas Kementrian Agama isu dana haji 2025 menurut Jemaah haji 2025 KBIHU Al Muna Depok pada konten 06 Januari 2025

1.4 Manfaat Penelitian

Isu dana haji 2025 menjadi perhatian utama masyarakat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak pemberitaan terhadap kredibilitas Kementerian Agama dapat memberikan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana konsumsi media dan koneksi publik akun Instagram @Kemenag tentang isu dana haji 2025 tidak hanya memengaruhi pandangan masyarakat, tetapi juga memberikan wawasan bagi Kementerian Agama dalam mengelola citra dan komunikasi publik. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan Kementerian Agama dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Kredibilitas Kementerian Agama sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk lembaga pemerintah dalam menghadapi tantangan pemberitaan yang sering kali kontroversial. Pemahaman ini juga dapat memberikan kontribusi penting bagi peneliti dan praktisi media dalam meningkatkan kualitas pemberitaan serta hubungan antara media dan lembaga pemerintah.

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini berkontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang komunikasi dan studi media, dengan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pemberitaan

dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademisi dan peneliti mengenai dinamika antara media, masyarakat, dan kebijakan publik, terutama dalam konteks isu haji yang sensitif. Hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Agama dalam mengelola citra dan komunikasi publik. Dengan memahami bagaimana konsumsi media dan koneksi publik memengaruhi kredibilitas lembaga, Kementerian Agama dapat merancang kebijakan komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap isu-isu yang muncul. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, jurnalis, dan praktisi media untuk meningkatkan kualitas pemberitaan serta membangun hubungan yang lebih baik antara media dan lembaga pemerintah, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Intelligentia - Dignitas